



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

KECAMATAN SUNGAI TABUK

Alamat: Jl. Gubernur Syarkawi Jalur 3 Abumbun Jaya Kode Pos 70653

KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI TABUK KABUPATEN BANJAR

NOMOR 049 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SUNGAI TABUK KABUPATEN BANJAR

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh informasi kinerja dalam rangka penyelenggaraan manajemen kinerja serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sungai Tabuk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Sungai Tabuk Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penilaian Mandiri Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021);
17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 56).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan: KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI TABUK KABUPATEN BANJAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN SUNGAI TABUK KABUPATEN BANJAR
- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar sebagai ukuran keberhasilan tujuan dan sasaran strategis
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan; menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja; menyusun Rencana Aksi Pencapaian Kinerja; menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sungai Tabuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. Indikator Kinerja Utama bagi Pejabat Struktural Eselon III dan IV, Fungsional dan Pelaksana tercantum dalam lampiran II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Sungai Tabuk Kabupaten Banjar ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sungai Tabuk
Pada Tanggal : 22 September 2025



Plt. Camat Sungai Tabuk,

H. AHMAD RABANI, AKS., M.Si
Pembina Tk I / IVb
NIP. 19690115 199002 1 001

Lampiran 1 : Keputusan Camat Sungai Tabuk
 Nomor : 049 Tahun 2025
 Tanggal : 22 September

**INDIKATOR KINERJA UTAMA CAMAT SUNGAI TABUK
 TAHUN 2025**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diperoleh hasil pengukuran dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang meliputi 9 unsur yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - kesesuaian persyaratan, - Prosedur pelayanan, - Kecepatan pelayanan, - Kewajaran biaya, - Kompetensi petugas, - Prilaku petugas pelayanan, - Penanganan pengaduan, - Kualitas sarana dan prasarana. <p>Meningkatnya kualitas pelayanan publik berarti adanya perbaikan atau peningkatan dalam berbagai aspek yang memengaruhi pengalaman dan kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan</p>	$IKM = \left(\frac{\sum \text{Total nilai persepsi per unsur}}{\sum \text{unsur yang terisi}} \right) \times 25$	Camat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
2.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	<p>Pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya. (Perbup Banjar Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan)</p> <p>Aspek yang dinilai meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aspek Administrasi, - Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, - Aspek Pelayanan Publik, - Aspek Kesejahteraan Sosial, - Aspek Ketentraman dan Ketertiban, - Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan - Aspek Pemberdayaan Masyarakat 	$\frac{\sum \text{Total Nilai Persepsi Per Unsur}}{\sum \text{Total Unsur yang terisi}}$	Camat	Tim Penilai Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	<p>Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah skor atau nilai yang diberikan kepada instansi pemerintah berdasarkan tingkat pencapaian kualitas akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, yang diukur berdasarkan hasil evaluasi penilaian terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</p>	$\sum ((\text{Perencanaan Kinerja} \times 30\%) + (\text{Pengukuran Kinerja} \times 30\%) + (\text{Pelaporan Kinerja} \times 15\%) + (\text{Evaluasi Internal} \times 25\%))$ <p>Komponen penilaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan kinerja 30% 2) Pengukuran kinerja 20% 3) Pelaporan kinerja 15% 4) Evaluasi internal 25% <p>Dari masing-masing komponen penilaian terdapat sub-komponen dengan bobot penilaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sub-komponen keberadaan 20% 2) Sub-komponen kualitas 30% 3) Sub-komponen pemanfaatan 50% <p>Kategori penilaian:</p>	Camat	LHE Perangkat Daerah

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
			<p>Nilai ini mencerminkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja serta penggunaan anggaran berbasis hasil.</p>	<p>AA : > 90 – 100 (Sangat Memuaskan) A : > 80 – 90 (Memuaskan) BB : > 70 – 80 (Sangat Baik) B : > 60 – 70 (Baik) CC : > 50 - 60 (Cukup Memadai) C : > 30 – 50 (Kurang) D : > 0 – 30 (Sangat Kurang)</p>		

Ditetapkan di : Sungai Tabuk
Pada Tanggal : 22 September 2025

Plt. Camat Sungai Tabuk,



H. AHMAD RABANI, AKS., M.Si
Pembina Tk I / IVb
NIP. 19690115 199002 1 001

Lampiran II : Keputusan Camat Sungai Tabuk
 Nomor : 049 Tahun 2025
 Tanggal : 22 September 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEJABAT ESSELON III DAN ESSELON IV KECAMATAN SUNGAI TABUK KABUPATEN BANJAR
 TAHUN 2025**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Tabuk	<p>Penilaian mandiri indikator kepatuhan dan kinerja intern (IKKI) Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk menilai tata kelola, manajemen risiko dan kematangan system pengendalian intern pada Perangkat Daerah.</p> <p>Nilai yang diperoleh dari hasil penilaian atas aspek Kinerja utama, Kepatuhan dan Pelayanan Publik, dimana meningkatnya kepatuhan dan kinerja internal perangkat daerah diartikan sebagai peningkatan tingkat disiplin, tanggung jawab, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi oleh aparatur perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-</p>	$\text{Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern} = \sum (\text{Unsur kinerja utama} \times 40\%) + (\text{Unsur kepatuhan} \times 30\%) + (\text{Unsur Pelayanan Umum} \times 30\%)$	Sekretaris Kecamatan	LHE Perangkat Daerah

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
			undangan,yang meliputi kepatuhan administratif dan pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan			
2	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan pelayanan yang terlaksana	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang terlaksana adalah ukuran tingkat keberhasilan Perangkat Daerah dalam mengkoordinasikan berbagai pihak terkait dan memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan dimaksud meliputi koordinasi dan Fasilitasi kegiatan pelayanan publik di Kecamatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu kegiatan administratif dan fasilitasi sosial kepada masyarakat dalam bidang kesejahteraan sosial, kependudukan, pemberdayaan, koordinasi bantuan kebencanaan yang dilaksanakan, diantaranya :	$\frac{\sum \text{Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan}}{\sum \text{Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang direncanakan}} \times 100 \%$	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Laporan Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Seksi Kesejahteraan Sosial

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
			<ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi SKTM - Dispensasi Nikah - surat Keterangan Ahli Waris - Surat Keterangan Pindah Datang - Fasilitasi Bantuan Sosial - Fasilitasi Pendampingan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Miskin 			
3	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan adalah perbandingan antara jumlah urusan pemerintahan yang berhasil difasilitasi atau diselenggarakan oleh kecamatan dengan jumlah total urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah kepada Camat sesuai peraturan yang berlaku. Penyelenggaraan dimaksud diukur dari seberapa banyak urusan yang tidak memiliki perwakilan atau unit kerja khusus di tingkat kecamatan berhasil ditangani.	$\frac{\sum \text{Realisasi Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Urusan Pemerintahan di kecamatan yang Dilaksanakan}}{\sum \text{Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan yang Direncanakan}} \times 100 \%$	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Laporan Kinerja Seksi Kesejahteraan Sosial

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
			<p>Tingkat keterlaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terkait dengan kesejahteraan sosial yang menjadi kewenangan daerah tetapi tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan dalam rangka efektifitas pelayanan kepada masyarakat yang meliputi kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Puskesmas, - stunting/pokjantal, - TPKK, - Verval DTKS, - PKH, - PBI, - Data P3KE dan PPKS 			
4	Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan Urusan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Pelayanan Urusan Kesejahteraan Sosial yang Mudah diakses	Ukuran kinerja yang menunjukkan banyaknya jenis pelayanan publik urusan Kesejahteraan Sosial yang tersedia di kecamatan dan dapat diakses masyarakat dengan cepat, sederhana, serta tidak menimbulkan hambatan administratif, teknis, maupun geografis.	Jumlah Pelayanan Urusan Kesejahteraan Sosial yang mudah diakses	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Laporan Jumlah Layanan Urusan Kesejahteraan Sosial yang mudah diakses yang dikelola oleh Kasi Kesejahteraan Sosial

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
			<p>Kriteria kemudahan akses dapat meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan Layanan: Layanan tersebut tersedia secara rutin dan terjadwal. - Prosedur yang Sederhana: Proses pengajuan atau penggunaan layanan tidak rumit dan mudah dipahami. - Waktu Tunggu yang Singkat: Masyarakat tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan layanan. - Jarak yang Terjangkau: Lokasi layanan mudah dijangkau oleh masyarakat, baik secara fisik maupun melalui sarana transportasi. - Informasi yang Jelas: Informasi tentang layanan tersedia secara transparan dan mudah diakses oleh masyarakat. 			

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
5	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<p>Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat terkait kewenangan tertentu dari Bupati yang secara administratif dimiliki pemerintah daerah yang didelegasikan kepada Camat untuk dilaksanakan sebagian tugas teknis operasional pemerintah daerah, pembangunan dan pelayanan publik di Kecamatan sesuai dengan prinsip dekonsentrasi dan tetap dalam kerangka koordinasi serta koordinasi dalam pertanggungjawaban kepada Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada asas efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.</p> <p>Ukuran persentase Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat adalah perbandingan antara jumlah jenis kewenangan atau urusan pemerintahan yang berhasil dilimpahkan oleh Kepala Daerah kepada Camat dengan jumlah total urusan pemerintahan yang seharusnya dapat dilimpahkan berdasarkan peraturan yang berlaku.</p>	$\frac{\sum \text{Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang terlaksanakan}}{\sum \text{Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan}} \times 100\%$	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Laporan Kinerja Seksi Kesejahteraan Sosial

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
			Adapun urusan pemerintahan yang dilimpahkan yaitu : - Kecamatan Sehat			
6	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	Ukuran tingkat keberhasilan suatu Perangkat Daerah dalam mengkoordinasikan berbagai pihak dan memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan untuk mewujudkan kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Persentase ini mengukur sejauh mana kegiatan yang direncanakan untuk mendorong inisiatif masyarakat telah dilaksanakan secara efektif. Pemberdayaan Masyarakat merupakan upaya-upaya pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan Kecamatan dalam memediasi, menghubungkan dan mengkoordinasikan berbagai program, kegiatan serta sumber daya untuk meningkatkan kapasitas, kemampuan, dan kemandirian masyarakat di Kecamatan secara berkelanjutan. Kegiatan Pemberdayaan	$\frac{\sum \text{Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan}}{\sum \text{Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang direncanakan}} \times 100 \%$	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
			Masyarakat mencakup berbagai kegiatan seperti pelatihan, penyediaan informasi, pengembangan kelembagaan, serta pemupukan modal masyarakat			
7	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan Pemberdayaan Desa adalah Upaya-upaya koordinasi pemberdayaan yang ditujukan untuk menyelaraskan berbagai program, kegiatan dan memberikan dukungan agar masyarakat desa dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Pengukuran kinerja menunjukkan tingkat ketercapaian kegiatan koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa di wilayah Kecamatan. Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa adalah perbandingan antara jumlah kegiatan koordinasi pemberdayaan yang berhasil dilaksanakan dengan jumlah kegiatan koordinasi yang direncanakan dalam satu periode anggaran. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan	$\frac{\sum \text{Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan}}{\sum \text{Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang direncanakan}} \times 100 \%$	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Laporan Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
			Masyarakat meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - pra musrembang Kecamatan, - musrembang Kecamatan, - bimtek profil desa, - bumdes - evaluasi perdes, - Monitoring APBDes - evaluasi rpjmdes, - PKK - LPM 			
8	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan adalah upaya-upaya pemberdayaan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat kelurahan dengan menyelaraskan berbagai program, kegiatan dan memberikan dukungan sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Pengukuran kinerja menunjukkan tingkat ketercapaian kegiatan koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat Kelurahan di wilayah Kecamatan dengan membandingkan antara jumlah kegiatan koordinasi yang	$\frac{\sum \text{Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan}}{\sum \text{Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang direncanakan}} \times 100 \%$	Lurah Sungai Lulut	Laporan Pelaksanaan Pemberdayaan Kelurahan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
			<p>dilaksanakan dengan jumlah kegiatan koordinasi yang direncanakan oleh unit kerja di tingkat Kecamatan atau Kelurahan dalam satu periode anggaran. Kegiatan koordinasi ini berfokus pada upaya menyalurkan, mengarahkan, dan menyatukan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang melibatkan berbagai pihak, seperti Lurah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Tim Penggerak PKK, dan Perangkat Daerah terkait lainnya.</p>			
9	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti	<p>Ukuran kinerja yang menggambarkan tingkat responsivitas kecamatan dalam menindaklanjuti setiap pengaduan, keluhan, aspirasi, maupun laporan masyarakat Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang masuk melalui berbagai saluran (langsung, tertulis, aplikasi, maupun media lainnya).</p>	$\frac{\sum \text{pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang diterima}} \times 100 \%$	Lurah Sungai Lulut	Laporan Pengaduan Urusan Pemberdayaan Kelurahan Sungai Lulut

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
10	Meningkatnya Kemudahan Akses Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang sesuai dengan Standar Pelayanan	Ukuran kinerja yang menunjukkan tingkat kepatuhan kecamatan dalam memberikan pelayanan publik Urusan Pemberdayaan Kelurahan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah baik dari segi prosedur, waktu, biaya, produk layanan, kompetensi petugas maupun sarana (mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 dan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik).	$\frac{\sum \text{Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang diberikan Sesuai Standar Pelayanan}}{\sum \text{Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan yang Sesuai Standar Pelayanan}} \times 100 \%$	Lurah Sungai Lutut	Laporan Pelayanan Urusan Pemberdayaan Kelurahan Sungai Lutut
11	Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	Keterlibatan Kecamatan dalam serangkaian tindakan dan kegiatan yang dilakukan Kecamatan, berbagai pihak yang terlibat dan masyarakat untuk menciptakan dan memelihara suasana yang teratur, aman, dan damai melalui penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (perkada), pembinaan kesadaran hukum, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait (aparatus atau instansi seperti Satpol PP dan Kepolisian)	$\frac{\sum \text{Gangguan Keamanan dan Ketertiban yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Gangguan Keamanan dan Ketertiban yang terjadi}} \times 100 \%$	Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban	Laporan Kegiatan Seksi Keamanan dan Ketertiban

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
12	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Suatu proses yang terukur dan terorganisir yang dilakukan oleh Kecamatan bersama unsur Forkopimcam (Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan), perangkat daerah terkait, dan aparatur desa/kelurahan dan masyarakat untuk menyatukan tindakan guna mewujudkan kondisi kehidupan yang aman, tentram, tertib dan teratur melalui serangkaian kegiatan komunikasi, fasilitasi, pengawasan, dan penanganan permasalahan seperti deteksi dini, pembinaan, patroli, penertiban, dan evaluasi, serta melibatkan upaya pembagian tugas dan pelaporan hasil pelaksanaan secara berkelanjutan untuk memastikan setiap upaya koordinasi yang direncanakan terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan untuk menjaga kondisi masyarakat yang kondusif.	$\frac{\sum \text{Koordinasi Trantibum yang Dilaksanakan}}{\sum \text{Koordinasi Trantibum yang direncanakan}} \times 100 \%$	Kepala Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban	Laporan Kegiatan Seksi Keamanan dan Ketertiban

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
13	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Proses terpadu yang dilaksanakan Kecamatan dengan melibatkan berbagai pihak terkait (seperti Satpol PP, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan) dalam menjalankan tugas mengawasi, menerapkan dan menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta melakukan tindakan hukum terhadap pelanggar untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat di Kecamatan.	$\frac{\sum \text{Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada yang Dilaksanakan}}{\sum \text{Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada yang direncanakan}} \times 100 \%$	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Laporan Kegiatan Seksi Keamanan dan Ketertiban
14	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum yang dilaksanakan	Upaya untuk menyatukan langkah dan memberikan bantuan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah. Tujuannya adalah memastikan kelancaran pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta memelihara ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI, seperti Peningkatan Wawasan Kebangsaan (penyelenggaraan apel 17 Agustus), Kerukunan Antar Suku Agama, Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, Demokrasi	$\frac{\sum \text{Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan}}{\sum \text{Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan}} \times 100 \%$	Kepala Seksi Pemerintahan	Laporan Kegiatan Seksi Pemerintahan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
			Pancasila dan pelaksanaan tugas Forkompimcam			
15	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, serta hubungan antar lembaga, dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman kepala daerah	Mengacu pada urusan yang merupakan kewenangan pemerintah pusat dan dilimpahkan pelaksanaannya ke daerah pada tingkat Kecamatan untuk dijalankan oleh Camat meliputi tugas umum pemerintahan seperti koordinasi dan pengawasan kewenangan daerah yang pada akhirnya menjadi bagian dari penugasan Kepala Daerah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Tingkat keberhasilan dan efektivitas koordinasi antara berbagai pihak dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Ruang lingkup penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang didelegasikan atau ditugaskan secara resmi oleh Kepala Daerah meliputi aspek koordinatif, fasilitatif, dan pelaksanaan teknis terkait ketenteraman dan	$\frac{\sum \text{Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan yang Dilaksanakan}}{\sum \text{Urusan Pemerintahan Umum yang ditugaskan}} \times 100 \%$	Kepala Seksi Pemerintahan	Laporan Kegiatan Seksi Pemerintahan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
			ketertiban umum, perlindungan masyarakat, pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, serta hubungan antar lembaga Peringatan HBN dan Hari Besar Keagamaan, MTQ, Forkopincam dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman Kepala Daerah.			
16	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	Ukuran kinerja yang menggambarkan tingkat responsivitas kecamatan dalam menindaklanjuti setiap pengaduan, keluhan, aspirasi, maupun laporan masyarakat Urusan Pemerintahan Umum yang masuk melalui berbagai saluran (langsung, tertulis, aplikasi, maupun media lainnya).	$\frac{\sum \text{pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum yang diterima}} \times 100 \%$	Kepala Seksi Pemerintahan	Laporan Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum
17	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik	Tata kelola administrasi pemerintahan desa adalah seluruh proses penyelenggaraan, pencatatan, pengarsipan, pengelolaan dan pengaturan dokumen administrasi, serta pengawasan atas sumber daya kebijakan di tingkat desa oleh pemerintah desa yang dilaksanakan secara tertib, akuntabel,	$\frac{\sum \text{Desa yang memiliki Tata Kelola Administrasi yang Baik}}{\sum \text{Desa di Wilayah Kecamatan Sungai Tabuk}} \times 100 \%$	Kepala Seksi Pemerintahan	Laporan Pelaksanaan Monitoring administrasi desa

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
			<p>transparan, dan sistematis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku , yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Tata kelola administrasi pemerintahan desa mencakup beberapa aspek penting, antara lain Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Administrasi Umum . Pelayanan Administratif, Pengelolaan Keuangan Desa, seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dan evaluasi Perda APBDes, - Penjaringan Perangkat Desa, Rakoor Pembakal, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, Penyelenggaraan pemilihan BPD 			
18	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan serta pengawasan pemerintahan desa adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendukung, mengarahkan, dan mengawasi penyelenggaraa pemerintahan Desa dengan kondisi di mana	$\frac{\sum \text{Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan yang Terlaksana}}{\sum \text{Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan direncanakan}} \times 100 \%$	Kepala Seksi Pemerintahan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
			<p>sistem, prosedur, dan mekanisme administrasi pemerintahan di tingkat desa mengalami perbaikan signifikan, sehingga menghasilkan pengelolaan yang lebih transparan, akuntabel, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perbaikan ini mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi penggunaan teknologi, dan penguatan koordinasi antar pihak terkait guna mendukung tercapainya pelayanan publik yang berkualitas di tingkat desa, meliputi fasilitasi, koordinasi, konsultasi, rakor Lurah pembakal, rakor BPD, penartaan ruang pegasan dan penetapan batas desa.</p>			
19	<p>Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas</p>	<p>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan</p>	<p>Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dapat diukur berdasarkan tercapainya nilai akuntabilitas kinerja yang lebih tinggi dan terpenuhinya berbagai indikator dalam proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi sesuai dengan</p>	$\frac{\sum \text{Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun sesuai ketentuan}}{\sum \text{Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun}} \times 100 \%$	<p>Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset</p>	<p>Dokumen Perencanaan, anggaran dan evaluasi Kecamatan Sungai Tabuk</p>

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
			<p>ketentuan peraturan perundang-undangan. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja diukur berdasarkan aspek :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan yang berkualitas (keseuaian dokumen perencanaan, keseuaian program, dan kelengkapan/kejelasan indikator) - Penganggaran yang berkualitas (kesesuaian dengan perencanaan, efektifitas dan efisiensi anggaran) <p>Evaluasi kinerja yang berkualitas (peningkatan nilai SAKIP, tersedianya laporan evaluasi, kualitas evaluasi, dan tindak lanjut hasil evaluasi)</p>			
20	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	Terlaksananya seluruh rangkaian kegiatan penatausahaan (pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan) secara tepat waktu, akurat, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang	$\frac{\sum \text{Dokumen Keuangan dan Aset yang disusun sesuai ketentuan}}{\sum \text{Dokumen Keuangan dan Aset yang disusun}} \times 100 \%$	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset	Dokumen Keuangan dan Aset Kecamatan Sungai Tabuk

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
			dilaksanakan Kecamatan meliputi Laporan LS, Laporan GU, dan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
21	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	Adanya perbaikan atau peningkatan dalam penyajian, akurasi, kelengkapan, dan relevansi laporan yang disusun oleh perangkat daerah (SKPD) terkait pengelolaan dan pengamanan aset daerah serta aset tersebut diamankan dari risiko kehilangan, kerusakan, atau penyalahgunaan. Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset sesuai ketentuan berarti laporan tersebut disusun dan disajikan berdasarkan aturan, standar, dan pedoman yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku. Dokumen pengelolaan antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Buku Persediaan - Kartu barang (KIB) - Berita Acara Serah Terima (BAST) - Berita acaea pemeriksaan fisik barang - Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) - Laporan 	$\frac{\sum \text{Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset BMD yang disusun sesuai ketentuan}}{\sum \text{Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset BMD yang disusun}} \times 100 \%$	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset	Dokumen Keuangan dan Aset Kecamatan Sungai Tabuk

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
			<p>persediaan Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang semesteran/ tahunan</p> <p>Dokumen pendukung terkait lainnya</p>			
22	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	<p>Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu diukur dari terlaksananya seluruh proses administrasi kepegawaian (pengelolaan data, dokumen, dan kegiatan yang berkaitan dengan manajemen ASN) secara efisien, tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi ini didukung oleh optimalnya penggunaan sistem informasi kepegawaian serta peningkatan kualitas layanan administrasi yang dirasakan oleh pegawai pada Perangkat Daerah. Pelayanan administrasi kepegawaian meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengusulan kenaikan pangkat - Mutasi - Cuti - Pensiun - Penilaian Kinerja dan data kepegawaian lainnya 	$\frac{\sum \text{Administrasi Kepegawaian yang sesuai dan tepat waktu}}{\sum \text{Administrasi Kepegawaian yang dibutuhkan}} \times 100 \%$	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Laporan Kegiatan Bidang Umum Kepegawaian Kecamatan Sungai Tabuk

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
23	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Adminsitasi Umum Perkantoran	Terfasilitasinya penyelenggaraan penunjang administrasi umum perkantoran diukur dari tersedianya dan berfungsinya secara optimal semua sarana dan prasarana perlatan, dan kebutuhan operasional kantor dengan tujuan untuk memastikan seluruh pekerjaan administrasi rutin dapat berjalan lancar, efektif, efesien dan sesuai dengan standar yang ditetapkan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi di Kecamatan meliputi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Bahan Logistik Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	$\frac{\sum \text{Administrasi Umum yang terfasilitasi}}{\sum \text{Fasilitasi Administrasi Umum yang dibutuhkan}} \times 100 \%$	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dokumen Administrasi Kepegawaian Kecamatan Sungai Tabuk
24	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan adalah Ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan pada dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang	$\frac{\sum \text{Realisasi BMD}}{\sum \text{BMD ang direncanakan}} \times 100 \%$	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Laporan Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
			<p>diukur dari tingkat kesesuaian antara realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan BMD yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran. Kesesuaian mencakup aspek jenis, spesifikasi teknis, jumlah, dan biaya yang telah direncanakan sebelumnya.</p> <p>Jumlah pengadaan BMD penunjang urusan daerah meliputi Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p>			
25	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	<p>Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi adalah perbandingan antara jumlah kebutuhan jasa penunjang yang berhasil difasilitasi atau disediakan dengan total kebutuhan jasa penunjang yang telah direncanakan atau dianggarkan dalam satu periode. Tingkat keterpenuhan penyediaan jasa penunjang/pendukung untuk memfasilitasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional dan administrasi pemerintahan daerah yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jasa surat menyurat - Jasa Komunikasi, 	$\frac{\sum \text{Jasa Penunjang yang terpenuhi}}{\sum \text{Jasa Penunjang yang harus dipenuhi}} \times 100 \%$	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Laporan penyediaan jasa penunjang di Kecamatan Sungai Tabuk

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
			<ul style="list-style-type: none"> - Sumber daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor (tenaga teknis) 			
26	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	<p>Barang milik daerah yang pelihara merupakan ukuran tingkat keberhasilan perangkat daerah dalam melaksanakan pemeliharaan dan perawatan terhadap aset-aset yang menjadi tanggungjawabnya. Pemeliharaan mencakup kegiatan perawatan rutin, perbaikan, dan pengamanan yang bertujuan untuk memstikan barang milik daerah berada dalam kondisi baik, layak pakai, dan memiliki nilai guna yang optimal. Tingkat pemeliharaan yang tinggi mencerminkan pengelolaan aset yang akuntabel dan efektif.</p> <p>Jumlah Jasa Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang terpelihara meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemelihraan Kendaraan Dinas Operasional/Lapan gan, 	$\frac{\sum BMD \text{ yang terpelihara}}{\sum \text{Pemeliharaan BMD yang direncanakan}} \times 100 \%$	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Laporan pelaksanaan pemeliharaan BMD

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
			<ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, - Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor Lainnya - Pemeliharaan peralatan dan mesin dll 			

Ditetapkan di : Sungai Tabuk
Pada Tanggal : 22 September 2025

Plt. Camat Sungai Tabuk,



H. ANMAD RABANI, AKS., M.Si
Pembina Tk I / IVb
NIP. 19690115 199002 1 001

Lembar III : Keputusan Camat Sungai Tabuk
 Nomor : 049 Tahun 2025
 Tanggal : 22 September 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 FUNGSIONAL DAN PELAKSANA ASN KECAMATAN SUNGAI TABUK KABUPATEN BANJAR
 TAHUN 2025**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 atau ketentuan perundangan lain yang berlaku Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah meliputi : Dokumen Renstra 2025-2029, IKU, IKU Perubahan PK, PK Perubahan, Rencana Aksi, Rencana Aksi Perubahan, Renja (Tahun n+1), Renja Perubahan (Tahun n), Tabel Keselarasan, Tabel Keselarasan Perubahan, DPA (Tahun n), DPA (Tahun n+1) Perubahan, RKA (Tahun n+1) dan RKA Perubahan (Tahun n)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun dalam satu tahun	JF Perencana Ahli Pertama	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Ukuran yang menunjukkan jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran SKPD yang disusun dalam periode waktu tertentu. Rencana Kerja Anggaran merupakan dokumen perencanaan dan anggaran yang berisi rencana pendapatan, belanja, program, kegiatan, dan pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD, sedangkan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD merupakan laporan yang berisi hasil-hasil atau ringkasan dari kegiatan koordinasi yang telah dilakukan antara berbagai pihak yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian dan kelancaran proses penyusunan dokumen RKA SKPD. Rencana Kerja Anggaran SKPD dimaksud adalah Rencana Kerja Anggaran (Tahun n+1)	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang disusun dalam satu tahun	JF Perencana Ahli Pertama	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi: LKJIP, Laporan kinerja TW 1-4 dan Laporan RfK (Jan- Des 2025)	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang dievaluasi dalam satu tahun	JF Perencana Ahli Pertama	LkjIP, Laporan Capaian Kinerja per Triwulan, Simondalev
4	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Ukuran kinerja yang menunjukkan banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) di perangkat daerah/kecamatan yang menerima hak kepegawaiannya berupa gaji pokok dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN Penerima Gaji dan Tunjangan = \sum ASN yang menerima gaji dan tunjangan sesuai ketentuan pada periode tertentu	Pengadministrasi Keuangan Sub Perencanaan, Keuangan Dan Aset	Dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
5	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Proses pencatatan, pengelolaan, dan pengujian/verifikasi atas transaksi keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah dilakukan secara sistematis, akurat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keandalan laporan keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengadministrasi Keuangan Sub Perencanaan, Keuangan Dan Aset	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
6	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan SKPD Audited adalah Dokumen/Laporan resmi yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan telah melalui proses audit oleh BPK. Laporan ini mencakup informasi keuangan yang telah diverifikasi untuk memastikan akurasi, kebenaran, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku.	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD (n-1) (audited) dikali 100%	Pengadministrasi Keuangan Sub Perencanaan, Keuangan Dan Aset	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
7	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen hasil pencocokan dan penyesuaian data Barang Milik Daerah (BMD) antara pencatatan yang dilakukan oleh kecamatan sebagai pengguna barang dan data yang tercatat di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai pengelola barang, yang disusun secara periodik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi BMD dikali 100%	Pengadministrasi Keuangan Sub Perencanaan, Keuangan Dan Aset	Laporan Rekonsiliasi BMD

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
8	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Serangkaian kegiatan administratif yang dilakukan oleh Pengurus Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang untuk mencatat, menginventarisasi, dan melaporkan seluruh aset milik daerah yang berada di bawah pengelolaan SKPD, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengadministrasi Keuangan Sub Perencanaan, Keuangan Dan Aset	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah
9	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kegiatan pemantauan, pengumpulan data, analisis, serta penilaian capaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan, dengan mengacu pada indikator kinerja individu maupun organisasi, untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelaksanaan tugas serta sebagai dasar pembinaan karier, pemberian penghargaan, maupun penegakan disiplin pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pengadministrasi Perkantoran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
10	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah melalui pelatihan, pendampingan dan sosialisasi.	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pengadministrasi Perkantoran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sertifikat Mengikuti Bimbingan Teknis / Diklat
11	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kebutuhan sarana dan prasarana instalasi listrik, termasuk jaringan, peralatan penerangan, serta komponen pendukung lainnya tersedia, berfungsi baik, dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kelancaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pengadministrasi Perkantoran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Laporan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
			operasional kantor serta pelayanan kepada masyarakat			
12	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kebutuhan sarana penunjang operasional kantor berupa peralatan rumah tangga kantor, yang meliputi perlengkapan kebersihan, peralatan dapur, alat penunjang konsumsi, dan kebutuhan rumah tangga kantor lainnya, dalam jumlah, kualitas, dan fungsi yang memadai guna mendukung kelancaran aktivitas perkantoran serta pelayanan kepada masyarakat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Pengadministrasi Perkantoran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Laporan Paket Peralatan Rumah Tangga
13	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kebutuhan bahan logistik kantor yang diperlukan oleh perangkat daerah, baik dalam bentuk formulir, blanko, surat menyurat, laporan, buku, undangan, maupun dokumen perencanaan dan administrasi lainnya, yang disediakan secara tepat jumlah, tepat waktu, dan sesuai standar kualitas guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, administrasi perkantoran, serta pelayanan kepada masyarakat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pengadministrasi Perkantoran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Laporan Paket Bahan Logistik Kantor
14	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kebutuhan barang cetak dan hasil penggandaan dokumen yang diperlukan oleh perangkat daerah, baik dalam bentuk formulir, blanko, surat menyurat, laporan, buku, undangan, maupun dokumen perencanaan dan administrasi lainnya, yang disediakan secara tepat jumlah, tepat waktu, dan sesuai standar kualitas guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan,	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Pengadministrasi Perkantoran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Laporan paket cetak dan Penggandaan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
			administrasi perkantoran, serta pelayanan kepada masyarakat			
15	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	SKPD melaksanakan penerimaan, pendampingan, dan pelayanan administrasi maupun teknis terhadap tamu resmi, baik dari instansi pemerintah, lembaga masyarakat, maupun pihak lain, yang datang dalam rangka tugas kedinasan atau koordinasi, sehingga tercipta suasana penerimaan yang baik, tertib, serta mendukung kelancaran komunikasi dan hubungan kerja	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Pengadministrasi Perkantoran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Laporan Kunjungan tamu/ Buku Tamu
16	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kegiatan yang dilaksanakan untuk menelaraskan pelaksanaan program, kebijakan, dan kegiatan lintas unit kerja, serta untuk memperoleh klarifikasi, arahan, atau solusi teknis dari instansi pembina atau mitra kerja terkait.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pengadministrasi Perkantoran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
17	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kebutuhan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja secara optimal, sesuai dengan standar kelayakan, jumlah, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadministrasi Perkantoran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dokumen Pengadaan mobil operasional
18	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kebutuhan perabot kantor dan fasilitas kerja berupa meja, kursi, lemari, rak, dan perlengkapan sejenis lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja secara optimal, sesuai dengan standar kelayakan, jumlah, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadministrasi Perkantoran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Laporan Pengadaan Mebel

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
19	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Kebutuhan unit kerja terhadap alat bantu kerja dan mesin penunjang operasional yang tidak termasuk kategori utama (seperti komputer, kendaraan dinas, atau mebel), namun memiliki fungsi penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan publik	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadministrasi Perkantoran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Laporan Pengadaan Peralatan dan Mesin
20	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kegiatan yang berkaitan dengan administrasi persuratan di kecamatan (baik surat masuk maupun surat keluar) dapat dilaksanakan sesuai dengan tata naskah dinas dan standar pelayanan administrasi, sehingga mendukung kelancaran komunikasi, koordinasi, dan pelayanan administrasi pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengadministrasi Perkantoran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Buku Surat Masuk dan Buku Surat Keluar
21	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional kantor berupa akses terhadap layanan telekomunikasi, pasokan air bersih, dan energi listrik secara berkelanjutan, aman, dan sesuai standar teknis, guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pengadministrasi Perkantoran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
22	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kebutuhan dasar operasional kantor melalui penyediaan jasa pendukung seperti tenaga kebersihan, keamanan dan pelayanan umum.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pengadministrasi Perkantoran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
23	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kegiatan pemeliharaan terhadap seluruh peralatan dan mesin telah dilakukan sesuai jadwal, prosedur, dan standar teknis yang ditetapkan, guna memastikan fungsi, keamanan, dan umur pakai tetap optimal	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pengolah Data Dan Informasi Sub Bag Umum Dan Kepegawaian	Laporan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
24	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kegiatan pemeliharaan terhadap seluruh peralatan dan mesin telah dilakukan sesuai jadwal, prosedur, dan standar teknis yang ditetapkan, guna memastikan fungsi, keamanan, dan umur pakai tetap optimal	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pengolah Data Dan Informasi Sub Bag Umum Dan Kepegawaian	Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
25	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kegiatan perawatan, perbaikan, dan/atau pembaruan terhadap gedung kantor dan bangunan penunjang lainnya dilaksanakan secara berkala atau insidental, guna menjaga keandalan fungsi, kenyamanan, keselamatan, dan estetika bangunan sesuai standar teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pengolah Data Dan Informasi Sub Bag Umum Dan Kepegawaian	Laporan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
26	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kondisi dimana proses penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan oleh kecamatan berlangsung secara lebih cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan memuaskan masyarakat dibandingkan periode sebelumnya, yang ditunjukkan melalui peningkatan kualitas, ketepatan waktu, kemudahan akses, serta kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diterima	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pengadministrasi Perkantoran Seksi Kesejahteraan Sosial	Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
27	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kegiatan yang menunjukkan Jumlah Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Pengadministrasi Perkantoran Seksi Kesejahteraan Sosial	Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
28	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kegiatan untuk meningkatnya keterlibatan aktif warga masyarakat dalam seluruh tahapan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa/kelurahan, yang ditunjukkan melalui kehadiran fisik, kontribusi ide/gagasan, keterwakilan kelompok, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan dan tindak lanjut hasil musyawarah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa/Kelurahan	Pengadministrasi Perkantoran Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Laporan Hasil Musrenbang Kecamatan
29	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di wilayah kecamatan dalam meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan warga, yang tercermin dari pencapaian tujuan program, partisipasi aktif masyarakat, keberlanjutan kegiatan, serta dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pengadministrasi Perkantoran Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
30	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang di kelurahan adalah kondisi dimana jumlah, keragaman, dan kualitas keterlibatan warga dalam proses perencanaan pembangunan kelurahan mengalami peningkatan dibanding periode sebelumnya, yang ditunjukkan melalui kehadiran, kontribusi gagasan, serta keterwakilan kelompok masyarakat dalam forum Musrenbang	jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lurah	Laporan kegiatan Pra Musrenbang dan Musrenbang Kelurahan
31	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Terbangunnya sarana dan prasarana kelurahan adalah kondisi dimana fasilitas fisik yang mendukung pelayanan publik, kegiatan masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup warga telah tersedia, dibangun, atau diperbaiki sesuai kebutuhan, standar teknis, dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Lurah	Laporan Kegiatan Dana Alokasi Umum (DAU) Kelurahan
32	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan adalah kondisi dimana pemerintah kelurahan bersama masyarakat berhasil melaksanakan kegiatan yang meningkatkan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian warga dalam pembangunan, yang ditunjukkan melalui adanya program, kegiatan, atau layanan yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan kegiatan pelatihan, penyuluhan, atau pendampingan	Lurah	Laporan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
33	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang meliputi, Bimtek Linmas, Bakti Sosial dan Sosialisasi Penanggulangan Kebencanaan.	Koordinasi, kolaborasi, dan pelaksanaan kegiatan bersama antara Pemerintah Kecamatan dengan unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan instansi vertikal lainnya yang berada di wilayah kerja kecamatan, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik	Pengadministrasi Perkantoran Seksi Ketentraman Dan Ketertiban	Laporan Hasil Pelaksanaan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
34	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kegiatan terkait koordinasi dan tindakan dalam menjaga/memelihara hubungan yang sinergis, komunikatif, dan kondusif antara pemerintah kecamatan/desa dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, yang ditunjukkan melalui keterlibatan aktif mereka dalam forum-forum konsultatif, dukungan terhadap program pembangunan, serta minimnya konflik sosial yang bersumber dari ketidaksepahaman atau ketegangan antar pihak	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Pengadministrasi Perkantoran Seksi Ketentraman Dan Ketertiban	Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
35	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kegiatan dalam pelaksanaan koordinasi, komunikasi dan Kerjasama Kecamatan dengan perangkat daerah terkait (Bakesbangpol, Satpol PP) dalam sosialisasi Perda/ Perkada	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pengadministrasi Perkantoran Seksi Ketentraman Dan Ketertiban	Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Perda / Perkada
36	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Tingkat pelaksanaan kegiatan edukatif, partisipatif, dan kolaboratif yang bertujuan meningkatkan pemahaman, sikap, dan perilaku warga terhadap nilai-nilai dasar kebangsaan dan ketahanan nasional, yang tercermin dalam pengamalan Pancasila, penghormatan terhadap UUD 1945, pelestarian keberagaman, serta komitmen menjaga keutuhan NKRI. Seperti pelaksanaan Upacara Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pengadministrasi Perkantoran Seksi Pemerintahan	Laporan Hasil Pelaksanaan pelaksanaan Upacara Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
37	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kondisi di mana tugas-tugas pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat namun tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal terkait, berhasil dilaksanakan secara efektif oleh pemerintah kecamatan melalui mekanisme koordinasi, pelaksanaan program, dan pelayanan yang terukur	Jumlah Dokumen forum/ koordinasi yang dilaksanakan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Pengadministrasi Perkantoran Seksi Pemerintahan	Dokumen Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
38	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kondisi di mana forum yang terdiri dari para pimpinan instansi pemerintahan dan unsur terkait di tingkat kecamatan melaksanakan tugas koordinasi secara efektif dan terjadwal	Jumlah Dokumen Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pengadministrasi Perkantoran Seksi Pemerintahan	Laporan kegiatan FORKOPIMCAM
39	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Pelaksanaan dukungan dan pendampingan pemerintah kecamatan terhadap desa dalam menjalankan fungsi administrasi pemerintahan secara tertib, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan, yang tercermin dari tersedianya dokumen administrasi yang lengkap, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta kepatuhan terhadap prosedur dan jadwal pelaporan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Pengadministrasi Perkantoran Seksi Pemerintahan	Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
40	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Pelaksanaan dukungan teknis, administratif, dan koordinatif oleh pemerintah kecamatan dalam membantu Kepala Desa dan perangkat desa menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang tercermin dari terselenggaranya pembinaan, konsultasi, supervisi, serta peningkatan kapasitas aparatur desa secara berkelanjutan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Pengadministrasi Perkantoran Seksi Pemerintahan	Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
41	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kegiatan Kecamatan melalui kewenangannya memberikan dukungan, pendampingan, bimbingan dan koordinasi kepada BPD dalam melaksanakan peran, tugas dan fungsinya. Khususnya dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membahas serta menyepakati peraturan desa bersama kepala desa, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Pengadministrasi Perkantoran Seksi Pemerintahan	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
42	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kegiatan Kecamatan melalui kewenangannya memberikan dukungan, pendampingan, bimbingan dan koordinasi kepada BPD dalam melaksanakan peran, tugas dan fungsinya. Khususnya dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membahas serta menyepakati peraturan desa bersama kepala desa, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Pengadministrasi Perkantoran Seksi Pemerintahan	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Ditetapkan di : Sungai Tabuk
Pada Tanggal : 22 September 2025

Pt. Camat Sungai Tabuk,



H. AHMAD RABANI, AKS., M.Si
Pembina Tk I / IVb
NIP. 19690115 199002 1 001